



DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI SULAWESI
SELATAN

RENJA 2022



KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pasal 126 s/d 129, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Awal R e n j a P e r a n g k a t D a e r a h

Menindaklanjuti peraturan tersebut maka Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan menyusun rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 - 2023. Rencana Kerja Awal ini menyajikan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya (2022) yang berintikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja serta pendanaan Perangkat daerah pada tahun 2023 yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi-Nya.

Makassar, 3 Maret 2022

Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan

H. AHMADI AKIL, SE.MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 1966123 199403 1 081

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 2

Daftar Isi..... 3

Bab I PENDAHULUAN4 - 11

Bab II HASIL EVALUASI RENJA DINASPERINDUSTRIAN TAHUN LALU.....12 - 47

Bab III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....48 - 58

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....59 - 69

Bab V PENUTUP.....69 - 72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah, maka Dinas Perindustrian sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan

Dalam penyusunan Renja OPD harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD, Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, Renstra, Renja K/L dan tindak lanjut proses penyusunan APBD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD

Gambar 1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Adapun Dasar Hukum penyelenggaraan pembangunan Sektor Industri di Sulawesi Selatan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286),
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846),
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Azas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan Industri,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota,
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
20. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi,
21. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139),
22. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal
23. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123),
24. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178),
25. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322),
26. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323),
27. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402),
28. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485),
29. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
30. Inpres No. 7 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,

31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),
32. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112),
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10),
34. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007,
35. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah , tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
36. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
37. Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327)
38. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
39. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248).
40. Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan virus disease 2019 di Lingkungan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
41. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.
42. Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496).
45. Keputusan Mentri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi Dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 7 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 10 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283)
49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Sulawesi Selatan,
51. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan nomor 293) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan daerah Provinsi sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Provinsi sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11 . Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309).
52. Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No.39 Tahun 2012 tentang hibah.

53. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Dengan Dasar Hukum ini, memberikan konsekuensi terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat menyusun Rencana Kerjanya. Program dan Kegiatan setiap tahun dengan parameter yang terukur dan dapat dilaksanakan untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai dengan kemampuan anggaran yang diselaraskan dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian maka disusunlah Rencana kerja yang disusun setiap tahunnya.

Landasan hukum inilah yang menjadi dasar dalam mengambil langkah strategis, pengambilan keputusan dan kebijakan. Hal ini dipergunakan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian baik dari segi aplikasi dilapangan maupun secara administratif keterlibatan dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RK-SKPD) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) sektor Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ini dimaksudkan untuk menetapkan sasaran dan indikator sasaran pembangunan tahun 2023 sebagai implementasi tahunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- Bab 1. Pendahuluan yang isinya mengemukakan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dari pembuatan Dokumen Renja serta sistematika penulisannya.
- Bab 2. Gambaran Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Tugas dan fungsi, Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPDSerta Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat

- Bab 3. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang dikaitkan Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan serta rencana Program prioritas yang akan dilaksanakan.
- Bab 4. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang didalamnya terkait Indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana
- Bab 5. Penutup, Kesimpulan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN TAHUN LALU

Dinas perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Menindaklanjuti RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2023 dengan menjabarkannya kedalam dokumen perencanaan OPD dalam bentuk dokumen Renstra (2019-2023) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuat setiap tahunnya yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

Sebagai dokumen perencanaan, Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, juga berfungsi sebagai tolak ukur kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan disektor perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk kurun waktu satu tahun. Maksud lain dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah untuk tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya sektor Industri yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Dalam mewujudkan Rencana kerja tersebut, telah direalisasikan dalam 4 Program yang diuraikan dalam 31 kegiatan pada Tahun 2022. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama bulan Januari-Desember 2022 dari target yang telah ditetapkan 100 % terealisasi sebesar 99,71 % adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah

memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut

Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan hasil kinerja tahunan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

a. **Program penunjang**

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:**

- Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Target Kinerja sebesar 18 unit dengan realisasi sesuai target.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Target Kinerja sebesar 18 unit dengan realisasi sesuai target.
- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Target Kinerja sebesar 4 item dengan realisasi sesuai target.

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari:**

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Target Kinerja sebesar 7 item dengan realisasi sesuai target.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Target Kinerja sebesar 10 item dengan realisasi sesuai target.

- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari:**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target Kinerja sebesar 600 surat dengan realisasi sesuai target.

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. Target Kinerja sebesar 24 dokumen dengan realisasi sesuai target.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Target Kinerja sebesar 49 orang dengan realisasi sesuai target.
- Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari:**
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Target Kinerja sebesar 7 dokumen dengan realisasi sesuai target.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Target Kinerja sebesar 100 orang dengan realisasi sebesar 75 orang.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD. Target Kinerja sebesar 100% dengan realisasi sesuai target.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD. Target Kinerja sebesar 100% dengan realisasi sesuai target.
 - Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD. Target Kinerja sebesar 100% dengan realisasi sesuai target.
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD. Target Kinerja sebesar 100% dengan realisasi sesuai target.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Target Kinerja sebesar 12 laporan dengan realisasi sesuai target.
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Target Kinerja sebesar 4 dokumen dengan realisasi sesuai target.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari:**
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Target Kinerja sebesar 77 orang dengan realisasi sesuai target.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD. Target Kinerja sebesar 31 sub kegiatan dengan realisasi sesuai target.
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. Target Kinerja sebesar 19 laporan kegiatan dengan realisasi sesuai target.
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Target Kinerja sebesar 2 laporan kegiatan dengan realisasi sesuai target.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari:**
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor. Target Kinerja sebesar 520 unit kegiatan dengan realisasi sesuai target.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Target Kinerja sebesar 165 kali kegiatan dengan realisasi sesuai target.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- a. **Program Perencanaan dan pembangunan industri (Prioritas)** dengan target kinerja pencapaiannya yaitu terwujudnya penambahan jumlah industri sebesar 5% dengan realisasi kinerja sebesar 4,96%, terdiri dari :
- **Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.004.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.804.200,- atau sebesar 90.86%. Target kinerja kegiatan ini adalah melaksanakan percepatan, penyusunan serta evaluasi rencana pembangunan industri target 3 dokumen dengan realisasi sebanyak 1 dokumen karena adanya refocusing dana
 - **Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.750.692.875,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.698.457.800,- atau sebesar 97.02 %. Target kinerja kegiatan ini adalah
 1. Gelar Produk Unggulan IKM target kinerja tahun 2021 yaitu terpromosikannya produk ikm pada 24 kab/kota se sulsel namun alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19
 2. Kompetensi SDM Diversifikasi Olahan Mete target kinerja terbinanya 25 org ikm olahan mete namun alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19
 3. Pengembangan IKM Hasil Perikanan, Peternakan target kinerja tahun 2021 pengolahan abon kepiting sebanyak 25 org, pengolahan daging ayam target 25 orang namun tidak terlaksana karena refocussing serta terbinanya ikm dan pemberian bantuan peralatan/mesin kepada ikm.
 4. Pembinaan dan Pengembangan Industri Halirisasi hasil Agro target kinerja tahun 2021 yaitu Pelatihan pengolahan pangan sebanyak 20 orang ikm,
 5. Olahan Pangan target kinerja tahun 2021 pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan dimana telah terealisasi pelatihan olahan bawang di kabupaten Bantaeng dengan jumlah 20 orang berupa bantuan peralatan/mesin pengiris bawang di Kabupaten Bantaeng

6. Diversifikasi Pengolahan Kopi dan Pengolahan Daun Kelor target kinerja tahun 2021 yaitu pelatihan diversifikasi pengolahan kopi dan pengolahan daun kelor sebanyak 20 org ikm serta diberikan bantuan berupa alat roasting kopi.
 7. Hilirisasi Kehutanan (Pengolahan nangka dan nanas, Pengolahan Bambu) target kinerja tahun 2021 pelatihan pengolahan nangka dan Nanas serta pelatihan pengolahan bambu sebanyak 25 org ikm serta pemberian peralatan vacuum fraying kepada IKM.
 8. Pelatihan IKM Logam Pande Besi target kinerja tahun 2021 terlaksananya pelatihan teknis pembuatan power Hammer dan Belt Grinding sebanyak 25 org serta bantuan peralatan mesin power hammer dan belt grinding.
 9. Pengembangan IKM Aluminium alokasi anggaran dialihkan ke penanganan covid 19.
 10. Pengembangan dan Pembinaan Industri Alat Mesin Pertanian realisasi kinerja yaitu pembuatan 1 paket prototype alat/mesin belt grinding dan spinner
 11. Pembinaan dan Pengembangan Industri Garam realisasi kinerja yaitu terlaksananya pembentukan sentra industri garam dan tersedianya 2 unit prototype alat/mesin iodisasi garam dan spinner
 12. Industri Hasil Tembakau realisasi kinerja yaitu terlaksananya pembentukan sentra dan tersedianya 2 unit prototype alat/mesin kepada sentra industri hasil tembakau
 13. Klinik Teknologi target kegiatan yaitu tersedianya 5 paket prototype alat/mesin
 14. Pembinaan dan Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil realisasi kinerja yaitu pembentukan sentra industri tenun di kabupaten Pinrang dan Tana Toraja.
- **Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.087.353.500,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 1.056.002.300,- atau sebesar 97.12 %.Target kinerja kegiatan ini adalah pembinaan sentra sebanyak 10 sentra yang terdiri dari kegiatan bimtek dan pendampingan serta bantuan peralatan kepada sentra industri di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan realisasi sesuai dengan target yakni 10 Sentra.
 - **Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.914.415.252,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 2.780.087.531,47,- atau

sebesar 95.39 %.Target kinerja kegiatan ini adalah terciptanya jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian dengan realisasi sesuai dengan target 100%

- b. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri** dengan target kinerja pencapaiannya yaitu pemenuhan jumlah produk industri yang memenuhi standart sebesar 4 produk dengan realisasi kinerja sebesar 4 produk terdiri dari :

- **Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik** dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 777.243.900,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 707.302.300,- atau sebesar 91.00 %. Target kinerja kegiatan ini adalah pemenuhan jumlah bantuan izin usaha industri dengan target 160 sertifikat dengan realisasi sebanyak 100 sertifikat halal dan sebanyak 60 pengajuan pendaftaran merk HAKI dimana sebanyak 35 dokumen pendaftaran merk yang lolos verifikasi.
- **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Industri di Bidang Industri dalam lingkup IUI,IPUI,IUKI,dan IPKI kewenangan provinsi** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 43.841.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.667.439,- atau sebesar 58.55%. Target kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI,IPUI,IUKI, dan IPKI) kewenangan provinsi dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 dokumen

- c. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional** target kinerja pencapaiannya yaitu presentase pemenuhan cakupan kelompok bina kelompok pengrajin sebesar 5 % dengan realisasi kinerja sebesar 5 % dan persentase pemenuhan industri kecil dan menengah yang berkembang sebesar 10% dengan realisasi 10 % terdiri dari :

- **Kegiatan Fasilitas Pegumpulan, Pengolahan, Analisis Data Industri dan Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)** dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.240.300,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 79.187.301,- atau sebesar 81.43%. Target kinerja kegiatan ini adalah dokumen/informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINas dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 dokumen
- **Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas** dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.28.090.000,- atau sebesar 66.88%.Target kinerja

kegiatan ini adalah jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui SIINas dengan realisasi sesuai dengan target yakni 2 publikasi data/informasi.

- **Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas** dialokasikan anggaran sebesar Rp.33.672.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 32.832.000,- atau sebesar 97.51%. Target kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINas dengan realisasi sesuai dengan target yakni 4 dokumen.

3. Adapun factor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja tahunan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 (untuk realisasi kinerja 95,94% adalah sebagai berikut :

- a. Wabah Covid 19 memberi dampak negatif terhadap sektor ekonomi yang mengakibatkan menurunnya Pelayanan IKM yang datang untuk mempergunakan peralatan di UPTD.
- b. Terjadinya bencana pandemic wabah covid 19 yang berpengaruh terhadap produktifitas Industri

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat daerah Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Kinerja dan Anggaran pada tahun 2020, untuk melihat segi efisiensi anggaran
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil :

Dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi diperlukan perumusan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun strategi dasar yang ditempuh adalah :

"Meningkatkan fasilitasi dan pelayanan yang efisien, efektif dan akuntabel di sektor industri guna mewujudkan sektor industri sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan kompetensi inti

Untuk mewujudkan tersebut maka pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia aparatur.
- Meningkatkan pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB.
- Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah.

- Meningkatkan penerapan standarisasi industri.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada **tabel T.C-29** :

TABELTC. 29

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub b Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/4)
3	31	3.31.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0.03 %					0,07 %		
						Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%					100%		
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%					100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%					100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen		
						jumlah peserta yang mengikuti forum OPD (orang)	100 orang		100 orang	100 orang	100%	100 Orang		

3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penyusunan dokumen rka skpd tepat waktu (persen)	100%		100%	100%		100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penyusunan dokumen rka perubahan skpd tepat waktu (persen)	100%		100%	100%		100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	persentase penyusunan dokumen dpa skpd tepat waktu (persen)	100%		100%	100%		100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	persentase penyusunan dokumen dpa perubahan skpd tepat waktu (persen)	100%		100%	100%		100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd (laporan)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%					100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02	3.31.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	77 Orang / bulan		77 Orang / bulan	77 Orang / bulan		77 orang/bulan		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02	3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah sub kegiatan pelaksanaan penatusahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd (sub kegiatan)	31 sub kegiatan		31 sub kegiatan	31 sub kegiatan		31 sub kegiatan		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02	3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan skpd (laporan)	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan		19 laporan		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02	3.31.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan hasil pemeriksaan (laporan)	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		

3	31	3.31.01	3.31.01.1.04		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	220500000 Rupiah		200000000 Rupiah	200000000 Rupiah		210000000 Rupiah		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.04	3.31.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.04	3.31.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah dokumen analisa pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi (dokumen)	2 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%		100%	100%		100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.05	3.31.01.0.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (laporan)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%		100%	100%		100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.06	3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit)	520 unit		520 unit	520 unit		520 unit		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.06	3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi skpd (kali)	165 kali		165 kali	165 kali		165 kali		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	100%		100%		

3	31	3.31.01	3.31.01.1.07	3.31.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	1 Unit		0 Unit	0 Unit		1 Unit		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.07	3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan (unit)	1 unit		0 Unit	0 Unit		1 unit		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.07	3.31.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang diadakan (item)	4 Item		7 Item	7 Item		4 item		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.07	3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi skpd (kali)	2 Item		10 Item	10 Item		2 item		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%		100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.08	3.31.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang keluar dan masuk (surat)	800 surat		600 surat	600 surat		700 surat		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.08	3.31.01.1.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah dokumen pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (dokumen)	24 dokumen		24 dokumen	24 dokumen		24 dokumen		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.08	3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	jumlah orang jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya (orang)	49 orang/ bulan		49 orang/ bulan	49 orang/ bulan		49 orang/ bulan		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%		100%	100%		100%		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.09	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	4 unit		18 unit	18 unit		4 unit		

3	31	3.31.01	3.31.01.1.09	3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	14 unit		14 unit	14 unit		14 unit		
3	31	3.31.01	3.31.01.1.09	3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (item)	6 item		4 item	4 item		6 item		
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri	6%		5%	5%		6%		
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01		Kegiatan Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan	4%		3%	3%		4%		
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan industri yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.02	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan (dokumen)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		
						jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan (dokumen)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang)	400 Orang		300 Orang	300 Orang		350 orang		

					Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi)	1 Potensi		2 Potensi	2 Potensi		1 Potensi		
						Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)	15 Unit		15 Unit	15 Unit		15 unit		
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan (sentra)	10 Sentra		10 Sentra	10 Sentra		10 Sentra		
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan (pelayanan)	30 Pelayanan		30 Pelayanan	30 Pelayanan		30 Pelayanan		
						Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan)	100 Pelayanan		100 Pelayanan	100 Pelayanan		100 Pelayanan		
						Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan)	20 Pelayanan		20 Pelayanan	20 Pelayanan		20 Pelayanan		
						Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)	50 Pelayanan		50 Pelayanan	50 Pelayanan		50 pelayanan		
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri (dokumen)	6 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen		6 Dokumen		

3	31	3.31.03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	% Peningkatan pengendalian izin usaha industry	2%		2%	2%		2%		
3	31	3.31.03	3.31.03.1.01	3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem	jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri (Sertifikat)	200 Sertifikat		160 Sertifikat	160 Sertifikat		200 Sertifikat		
3	31	3.31.03	3.31.03.1.01	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	8 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen		8 Dokumen		
3	31	3.31.04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% Peningkatan pengelolaan SIINAS	3%		2%	2%		3%		
3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	Jumlah dokumen/ informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		

3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui siinas (Publikasi data/informasi)	4 Publikasi data/informasi		4 Publikasi data/informasi	4 Publikasi data/informasi		4 Publikasi data/informasi		
3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Sehubungan dengan kinerja pelayanan OPD, perlu dilakukan pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bias menentukan masa depan organisasi Dinas Perindustrian.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta norma standar pelayanan masing-masing OPD

Berkaitan dengan hal tersebut, maka analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian bertujuan :

1. Menyesuaikan kembali rumusan strategi pelayanan OPD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Renstra OPD Tahun 2019-2023;
2. Menyesuaikan kembali rumusan strategi pelayanan OPD berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RKPD;
3. Menyesuaikan kembali rumusan strategi kebijakan berdasarkan RPJMD.

Presentase capaian Analisis Kinerja OPD dapat dilihat pada **tabel T.C-30**

TABEL TC 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE ...		CATATAN
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat daerah		- Persentase Nilai SAKIP Organisasi Perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	72,62 %	76,58 %	72,62 %		
			- Persentase Nilai SKP kategori baik	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %	90 %		
			- Rata2 capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan.	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	100 %	90 %		
			- Persentase temuan material	0,1 %	0,07 %	0,05 %	0,03 %	0,1 %	0,7 %	100 %		
2	Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektorsektoruistri daerah dalam mendorong perekonomian daerah		Persentase kontribusi industry terhadap PDRB	11 persen	125 persen	13 persen	13 persen	12,71 persen	12,47 persen	115 Persen		

3	Mewujudkan iklim industry daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industry daerah dan nebarik tumbuh berkembangnya industry baru		Persentase Industri yang telah terstandarisasi	20 persen	30 persen	35 persen	40 persen	20 persen	1,67 persen	100 persen		
4	Mewujudkan iklim industry Daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industry daerah dan nenarik tumbuh berkembangnya industry baru		Persentase Akses dan Pemanfaatan informasi industry oleh masyarakat	1 persen	2 persen	2,5 persen	3 persen	1 persen	1,97 persen	100 persen		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian.

Setelah melakukan analisis terhadap (1) permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) peranannya dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (3) Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, (4) potensi dan kondisi serta rencana pembangunan beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan (5) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya Kawasan Strategi Nasional (KSN), serta memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh, maka ditetapkan isu-isu strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

- 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
- 2. Peningkatan kontribusi sektor industri terhadap nilai PDRB.
- 3. Peningkatan penerapan standarisasi industri.
- 4. Meningkatkan pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi Industri

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan gambaran rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian Prov, Sulawesi Selatan dalam mencapai indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Sedangkan hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan merupakan penjabaran program dan kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan pada rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023

Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dengan Renja Dinas Perindustrian telah sesuai sebagaimana tertuang dalam **tabel T.C-31**.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Akhir Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pilihan										
	Perindustrian										
	Dinas Perindustrian										
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0.01 %	250,465,492,545	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0.03 %	250,465,492,545	
			Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %				Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %		
			Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %				Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %		
1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	528,300,000	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	528,300,000	
1.1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	7 Dokumen	446,250,000	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	7 Dokumen	446,250,000	

			jumlah peserta yang mengikuti forum OPD (orang)	100 Orang				jumlah peserta yang mengikuti forum OPD (orang)	100 Orang		
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	persentase penyusunan dokumen rka skpd tepat waktu (persen)	100 %	9,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	persentase penyusunan dokumen rka skpd tepat waktu (persen)	100 %	9,500,000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	persentase penyusunan dokumen rka perubahan skpd tepat waktu (persen)	100 %	12.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	persentase penyusunan dokumen rka perubahan skpd tepat waktu (persen)	100 %	12.600.000,00	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	persentase penyusunan dokumen dpa skpd tepat waktu (persen)	100 %	10.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	persentase penyusunan dokumen dpa skpd tepat waktu (persen)	100 %	10.500.000,00	
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	persentase penyusunan dokumen dpa perubahan skpd tepat waktu (persen)	100 %	12.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	persentase penyusunan dokumen dpa perubahan skpd tepat waktu (persen)	100 %	12.600.000,00	
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd (laporan)	12 Laporan	10.600.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd (laporan)	12 Laporan	10.600.000,00	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	4 Dokumen	26.250.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	4 Dokumen	26.250.000,00	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	provinsi Sulawesi Selatan	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	14,343,000,000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	provinsi Sulawesi Selatan	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	14,343,000,000	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	77 orang/ bulan	13,650,000,000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	77 orang/ bulan	13,650,000,000	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sub kegiatan pelaksanaan penatusahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd (sub kegiatan)	31 sub kegiatan	315,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah sub kegiatan pelaksanaan penatusahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd (sub kegiatan)	31 sub kegiatan	315,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah laporan keuangan skpd (laporan)	19 laporan	367,500,000	Koordinasi dan dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah laporan keuangan skpd (laporan)	19 laporan	367,500,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah laporan hasil pemeriksaan (laporan)	2 laporan	10,500,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah laporan hasil pemeriksaan (laporan)	2 laporan	10,500,000	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	210000000 Rupiah	210000000 Rupiah	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	210000000 Rupiah	210000000 Rupiah	
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	1 Dokumen	105,000,000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	1 Dokumen	105,000,000	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen analisa pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi (dokumen)	2 Dokumen	105,000,000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen analisa pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi (dokumen)	2 Dokumen	105,000,000	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	provinsi Sulawesi Selatan	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	105,000,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	provinsi Sulawesi Selatan	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	105,000,000	

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (laporan)	1 Laporan	105,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan (laporan)	1 Laporan	105,000,000	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	867,499,254	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	867,499,254	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit)	520 unit	27,499,254	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit)	520 unit	27,499,254	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi skpd (kali)	165 kali	840,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi skpd (kali)	165 kali	840,000,000	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4,550,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4,550,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	1 unit	1,100,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	1 unit	1,100,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan (unit)	1 unit	300,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan (unit)	1 unit	300,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang diadakan (item)	4 item	1,050,000,000	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang diadakan (item)	4 item	1,050,000,000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	provinsi Sulawesi Selatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 item	2,100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	provinsi Sulawesi Selatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 item	2,100,000,000	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	provinsi Sulawesi Selatan	persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,381,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	provinsi Sulawesi Selatan	persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3,381,000,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah surat yang keluar dan masuk (surat)	700 surat	126,000,000	Penyediaan jasa surat menyurat	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah surat yang keluar dan masuk (surat)	700 surat	126,000,000	
	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (dokumen)	24 dokumen	630,000,000	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (dokumen)	24 dokumen	630,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah orang jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya (orang) perbulan	49 orang/ bulan	2,625,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah orang jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya (orang) perbulan	49 orang/ bulan	2,625,000,000	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	1,061,750,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	provinsi Sulawesi Selatan	persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	1,061,750,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	4 unit	525,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	4 unit	525,000,000	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	14 unit	36,750,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	14 unit	36,750,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (item)	6 item	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (item)	6 item	500,000,000	
II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	provinsi Sulawesi Selatan	Persentase pertambahan jumlah industri	6 %	14,180,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	provinsi Sulawesi Selatan	Persentase pertambahan jumlah industri	6 %	14,180,000,000	
8	Kegiatan Penyusunan dan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	provinsi Sulawesi Selatan	persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan	4 persen	14,180,000,000	Kegiatan Penyusunan dan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	provinsi Sulawesi Selatan	persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan	4 persen	14,180,000,000	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan industri yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	210,000,000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan industri yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	210,000,000	
	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan (dokumen)	1 dokumen	350,000,000	Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan (dokumen)	1 dokumen	350,000,000	
			jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan (dokumen)	2 dokumen				jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan (dokumen)	2 dokumen		

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang)	350 orang	4,800,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang)	350 orang	4,800,000,000	
			Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi)	1 potensi				Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi)	1 potensi		
			Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)	15 unit				Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)	15 unit		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan	10 sentra	4,600,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan	10 sentra	4,600,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri dan Peran serta Masyarakat	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan (pelayanan)	30 pelayanan	4,100,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri dan Peran serta Masyarakat	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan (pelayanan)	30 pelayanan	4,100,000,000	
		provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan)	100 Pelayanan			provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan)	100 Pelayanan		
		provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan)	20 pelayanan			provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan)	20 pelayanan		

		provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)	50 pelayanan			provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)	50 pelayanan		
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri (dokumen)	6 dokumen	120,000,000			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	6 dokumen	120,000,000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	provinsi Sulawesi Selatan	% Peningkatan pengendalian izin usaha industry	2 %	1,451,248,971	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	provinsi Sulawesi Selatan	% Peningkatan pengendalian izin usaha industry	2 %	1,451,248,971	
9	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin perluasan Usaha Industri(IPUI),Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)kewenangan Provinsi	provinsi Sulawesi Selatan	persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	11 persen	1,451,248,971	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin perluasan Usaha Industri(IPUI),Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)kewenangan Provinsi	provinsi Sulawesi Selatan	persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	11 persen	1,451,248,971	
	Fasilitas Pemenuhan komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI. Dan IPKI. Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	200 Sertifikat	1,250,000,000	Fasilitas Pemenuhan komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI. Dan IPKI. Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	200 Sertifikat	1,250,000,000	

	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinzn di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	8 Dokumen	201,248,971	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinzn di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	8 Dokumen	201,248,971	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	provinsi Sulawesi Selatan	% Peningkatan pengelolaan SIINAS	3 %	577,500,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	provinsi Sulawesi Selatan	% Peningkatan pengelolaan SIINAS	3 %	577,500,000	
10	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	provinsi Sulawesi Selatan	persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	3 persen	577,500,000	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	provinsi Sulawesi Selatan	persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	3 persen	577,500,000	
	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Xdata Industri , Data Kawasan Industri, serta data lain lingkup Provinsi melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen/ informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen	262,500,000	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Xdata Industri , Data Kawasan Industri, serta data lain lingkup Provinsi melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen/ informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen	262,500,000	

	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINass	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui siinas (Publikasi data/informasi)	4 Publikasi data/informasi	157,500,000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINass	provinsi Sulawesi Selatan	jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui siinas (Publikasi data/informasi)	4 Publikasi data/informasi	157,500,000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian data Ke SIINas	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen	157,500,000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian data Ke SIINas	provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen	157,500,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Khusus untuk provinsi kajian usulan program dan kegiatan untuk OPD Provinsi berbeda dengan tingkat kabupaten/kota mengingat pemangku kepentingan provinsi mencakup skala yang lebih besar dan ruang yang lebih luas, termasuk pemerintah kabupaten/kota merupakan pemangku kepentingan yang sangat strategis.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kab/kota

Dinas Perindustrian menerima langsung usulan program dan kegiatan dari 24 kab/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. karena tupoksinya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, dan Dinas Perindustrian memfasilitasi usulan kegiatan yang diajukan Berdasarkan telaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentinagn dapat dilihat pada **Tabel T.C-32**

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prov.Sulsel	Persentase pertambahan jumlah industri	5%	
1	Kegiatan Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Prov.Sulsel	persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan	4%	Rekomendasi : perjelas penerima manfaat dan jumlah bantuan yang akan diberikan. Lengkapi dokumen pendukung sesuaikan dengan kemampuan daerah.
1,1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Prov.Sulsel	jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan industri yang disusun (Dokumen)	1 Dokumen	
1,2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Prov.Sulsel	Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan (dokumen)	1 Dokumen	Nama OPD yang terkait : Dinas PUPR, Dinas Tarkim, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu
			jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan (dokumen)	2 Dokumen	
1,3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Prov.Sulsel	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang)	400 orang	Nama OPD yang terkait : Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM
			Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi)	1 Potensi	

1			Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)	15 unit	Rekomendasi : perjas penerima manfaat dan jumlah bantuan yang akan diberikan. Lengkapi dokumen pendukung sesuai dengan kemampuan daerah.
1,4	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Prov.Sulsel	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan (sentra)	10 Sentra	Nama OPD yang terkait : Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan
1,5	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Prov.Sulsel	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan (pelayanan)	30 Pelayanan	Nama OPD yang terkait : Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM Rekomendasi : perjas penerima manfaat dan jumlah bantuan yang akan diberikan. Lengkapi dokumen pendukung sesuai dengan kemampuan daerah.
		Prov.Sulsel	Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan)	100 Pelayanan	
		Prov.Sulsel	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan)	20 Pelayanan	
		Prov.Sulsel	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)	50 pelayanan	
1,6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Prov.Sulsel	jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri (dokumen)	6 Dokumen	
II	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Prov.Sulsel	% Peningkatan pengendalian izin usaha industri	2%	

2,1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Provinsi	Prov.Sulsel	persentase industri yang bersertifikat/ terstandarisasi	10%	
2,2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem	Prov.Sulsel	jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri (Sertifikat)	200 Sertifikat	Nama OPD yang terkait : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan Rekomendasi : perjelas penerima manfaat dan jumlah bantuan yang akan diberikan. Lengkapi dokumen pendukung sesuaikan dengan kemampuan daerah.
2,3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Prov.Sulsel	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	9 Dokumen	Nama OPD yang terkait : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prov.Sulsel	% Peningkatan pengelolaan SIINAS	2%	
3	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	Prov.Sulsel	persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	2%	
3,1	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	Prov.Sulsel	Jumlah dokumen/ informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen	Nama OPD yang terkait : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3,2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Prov.Sulsel	jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui siinas (Publikasi data/informasi)	4 Publikasi data/informasi	Nama OPD yang terkait :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3,3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Prov.Sulsel	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINAS (Dokumen)	4 Dokumen	

B A B III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Kementerian Perindustrian adalah Meningkatkan **industri** yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta **industri** hijau. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan **industri** oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat. Dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dalam rencana strategis disusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan 2019 - 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 - 2023 di mana setiap tahunnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan unit pelaksana. Rencana Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai kedepan dalam kurun waktu tertentu yang disusun dengan memperhatikan; RPJM Nasional, RPJPD Sulawesi Selatan 2008-2028, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan.

Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur/Wakil Gubernur. Untuk itu Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun pertama RPJMD 2019-2023 adalah:

“ Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter”.

3.1.1 Visi

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi didalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemahkan provinsi sulawesi selatan yang “bersih dan melayani” terkoneksi”, mandiri dan sejahtera”, sehat dan cerdas serta berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. **INOVATIF** adalah kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud sulawesi selatan yang bersih melayani.

2. **KOMPETITIF** adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang sehat dan cerdas.
3. **PRODUKTIF** adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujudnya Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera.
4. **INKLUSIF** Adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi .
5. **BERKARAKTER** Adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang berkarakter.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan yang responsif dan inklusif dengan berbasis pada inovasi.
- b. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel, membangun infrastruktur dalam menguatkan interkoneksi antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir.
- c. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai keunggulan komparatif wilayah.
- d. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter memenuhi akses pendidikan yang berkualitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa hambatan bagi seluruh warga serta mendorong pelestarian dan kemajuan kebudayaan daerah.
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk perekonomian rakyat serta melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam .

3.1.2 Misi

Adapun misi pembangunan Daerah ada 7 (tujuh), yaitu:

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmonis sosial dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih

3.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi diperlukan perumusan cara mencapai tujuan dan sasaran (strategi) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun strategi dasar yang ditempuh adalah :

"Meningkatkan fasilitasi dan pelayanan yang efisien, efektif dan akuntabel di sektor industri guna mewujudkan sektor industri sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan kompetensi inti daerah".

Untuk mewujudkan tersebut maka pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Perindustrian Propinsi Sulawesi Selatan
- Peningkatan teknologi dan daya saing produk.
- Penataan struktur industri

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2023 telah merumuskan 4 (empat) program yang merupakan penjabaran dari strategi dasar dan 5 (lima) kebijakan publik di atas. Ke-4 (empat) program tersebut adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengendalian Sistem Informasi Industri Nasional

Adapun Visi Pembangunan Sulawesi Selatan untuk 5 tahun RPJMD 2019-2023 telah ditetapkan sebagai berikut:

" Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inkulsif dan berkarakter". Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan Nasional pada tahun 2021 diharapkan menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.

Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan juga sebagai Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan.

Simpul Jejaring adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, Inter koneksitas (pendidikan, kesehatan, serta perhubungan darat, laut dan udara)

Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang proses dan hasil perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui pengelolaan keragaman modal manusia, sosial, budaya, alam, fisik, dan finansial sehingga dapat mempercepat perwujudan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Kerja

Tujuan merupakan penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah
- 2. Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor Industri Daerah dalam mendorong perekonomian daerah
- 3. Mewujudkan iklim Industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi Industri Daerah dan menarik tumbuh berkembangnya Industri baru

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah Adapun sasaran Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah
- 2. Meningkatnya kontribusi sector industri terhadap PDRB
- 3. Meningkatnya penerapan standarisasi industri
- 4. Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebaran informasi industri.

Keterkaitan antara program Dinas Perindustrian Provinsi Sulawsi Selatan dengan RP JMD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan Renja Dinas Perindustrian Tahun 2022

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan berkarakter			
Misi : (1) Pemerintah yang Berorientasi , Melayani dan Inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1). Meningkatkan Akutabilitas Perangkat Daerrah	(1) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	(1) Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah	(4) Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah
Misi : (5) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk, Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(2) Meningkatkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industry daerah dalam mendorong perekonomian daerah	(2) Meningkatnya kontribusi sector industry terhadap nilai PDRB	(2) Peningkatan nilai PDRB sector Industri	(3) Peningkatan kontribusi sector industry terhadap nilai PDRB
(3) Mewujudkan iklim industry daerah yang kondusif dan mampu menjamin	(3) Meningkatnya penerapan standarisasi industry	(3) Peningkatan standarisasi industry (4) Peningkatan	(1) Peningkatan daya saing industry melalui penerapan standarisasi indusrti

keberlangsungan eksistensi industry daerah dan menarik tumbuh berkembangnya industry baru	(4) Meningkatnya pengelolaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi Industri	informasi industri	(2) Peningkatan publikasi informasi industridan akses informasi industry ke masyarakat
---	--	--------------------	--

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian merupakan Penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan adalah dengan menetapkan4(empat) program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan indikasi anggaran keseluruhan sebesar **Rp27,783,274,874 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh tujuh empat rupiah)**. Adapun ke 4 (empat) program tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengendalian Sistem Informasi Industri Nasional

Adapun Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, antara lain :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
2. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**
 - Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
3. **Program Pengendalian Izin Usaha ndustri**
 - Kegiatan Penertiban izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
4. **Program Pengendalian Sistem Informasi Industri Nasional**

- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IU, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Pencapaian SDGS

Dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi organisasi diperlukan perumusan (strategi) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Adapun strategi dasar yang ditempuh adalah :”Meningkatkan fasilitasi dan pelayanan yang efisien, efektif dan akuntabel di sektor industri guna mewujudkan sektor industri sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan kompetensi inti daerah”.

Untuk mewujudkan tersebut maka pokok-pokok kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat daerah
- Peningkatan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
- Peningkatan Daya Saing Industri melalui penerapan standarisasi Industri
- Peningkatan publikasi informasi industri dan akses informasi Industri ke masyarakat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2022 telah merumuskan 4 (empat) program yang merupakan penjabaran dari strategi dasar dan 4 (empat) kebijakan publik di atas. Ke-4 (empat) program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
4. Program Pengendalian Sistem Informasi Industri

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja SKPD.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2021 disusun Rencana Kinerja (*performance plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2022 yang merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi

PENGENTASAN KEMISKINAN

Salah satu tahapan dalam proses manajemen adalah menyusun faktor penentu keberhasilan yang diawali dengan mengkaji lingkungan strategis yang meliputi kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Lingkungan internal dan eksternal

mempunyai dampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. Dalam upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang lebih maju guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan industri yang mandiri.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja penuntasan kemiskinan untuk tahun selanjutnya maka Pemerintah OPD Dinas perindustrian melakukan kebijakan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi antara perencanaan dan keuangan sehingga dokumen perencanaan betul-betul dapat dipedomani untuk penentuan anggaran.
- b. Mengupayakan program dan kegiatan pada OPD agar direncanakan sesuai dengan indikator kinerja yang dapat diukur.
- c. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD Dinas Perindustrian tepat waktu.
- d. Melakukan koordinasi yang intensif kepada pemerintah dan pemerintah provinsi terkait dengan penerimaan daerah.
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.
- f. Melakukan kerja sama antara kabupaten kota terkait Industri yang dapat di kembangkan berdasarkan kompetensi daerahnya sehingga dapat memberdayakan masyarakat pada kabupaten tersebut.
- g. Memberikan peluang usaha setiap indsutri untuk mengembangkan produknya yang mempunyai nilai standart melalui bimbingan dan pengembangan mutu produk
- h. Memberikan peluang usaha pelaku industri melalui promosi produk melalui promosi event daerah dan internasional dengan demikian pelaku usaha industri mempunyai motifasi dan inovasi serta berkreasi dalam meningkatkan kualitas dan kwantitas produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang bernilai tinggi.

Dengan adanya komoditi yang terorganisir memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui proses pembentukan sentra serta kawasan industri yang mengefisienkan dan efektif dalam penggunaan bahan baku alam sehingga dapat melestrikan sumber daya potensial pada setiap daerah agar dapat berkembang dan lebih mandiri sehingga dapat meningkatkan dan menggerakkan perekonomian trutama sektor industri sbagai salah satu pilar pengentasan kemiskinan melalui pembaberdayaan Industri kecil dan menengah ataupun home industri yang ada pada kabupaten Kota.

PENCAPAIAN SPK DAN SPM DINAS PERINDUSTRIAN

Dalam rangka pencapaian peningkatan daya saing ekonomi pada sektor Industri di hadapkan pada tantangan eksternal dan internal.Tantangan dan hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Pemerintaah hal ini secara laangsung atau tidak langsung .Dalam

rangka meningkatkan perekonomian ada sektor industrisecara global memberikan keterkaitan peluang sekaligus ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan industri dari sisi internal,dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif dan terkait efektifitas dan efesien usaha industri di harapkan mampu meningkatkan performa industri dan investasi pelaku uaha dengan pihak ketiga yang mampu meningkatkan ,menggerakkan serta mengelola sumber daya yang di miliki.

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran serta OPD Dinas Perindustrian dalam rangka membangun daya saing tersebut perlu adanya sistem menejemen yang efektif dan efesien yang berbasis kinerja harus sejalan dan senergi dengan perkembangan di namika perindustrian.

Selain itu OPD Dinas perindustrian sebagai pembina sektor Industrigiat melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki kinerja manejemen dalam rangka peningkatan pelayanan hal ini tertuang diantaranya adanya fasilitasi izin industri baik Industri kecil dan menengah dalam hal ini tertuang dalam spm Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan

Upaya yang di lakukan pemerintah dalam memfasilitasi Pelaku Usaha dalam meningkatkan perekonomian industri antara lain :

- Memperbaiki iklim usaha untuk meningkatkan daya saing industri melalui upaya penyempurnaan kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing industri melalui pembinaan dan pembentukan sentra dan kawasan industri
- Fasilitasi promosi produk Industri melalui event daerah dan nasional.
- Pelaksanaan fasilitasi Industri tertuang dalam izin usaha
- Penerapan strategi pengembangan industri potensil di berbagai daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
- Pembinaan dan pengembangan produk yang mempunyai nilai tinggi sehingga dapat bersaing antara pelaku usaha dan dapat mengikuti penyelenggaran trade EXPO Indonesia.

Perekonomian pada sektor industri selalu bergerak di tengah di namika regional dan internasional.Dalam era tehnologi informasi ,komonikasi dan transportasi setiap dunia usaha harus mampu mengikuti dinamika perkembangan industri semakin cepat mengubah peta perindustian secara mendasar ,maka perlu di lakukan penyesuaian strategi kebijakan yang mendukung perkembangan industri yang bernilai tinggi dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hal ini tertuang dalam standart Pelayanan Minimaal (SPM) OPD Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

PENGUNAAN POTENSI EKONOMI DAERAH

Sulawesi Selatan sebagai salah satu emargin market yang terus tumbuh di tengah perkembangan industri yang memiliki potensi cukup besar perihal perkembangan potensi industri baik secara mikro maupun makro.Hal ini dapat di mamfaatkan guna mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah melalui pembinaan dan pembentukan sentra dan kawasan industri melalui kerja sama antara pelaku usaha dengan pihak ketiga yang mampu memberikan peluang untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam berusaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam rangka meningkatkan promosi industri dilakukan Multitrack strategi baik regional maupun bilateral, dengan demikian pemerintah mengupayakan bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk daerah sehingga dapat bersaing dalam komoditas daerah maupun luar daerah sebagai catatan saat ini masih rendahnya daya saing produk sehingga perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan sehingga dapat bersaing pada pasar domestik maupun luar Domestik.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memfasilitasi Pelaku Usaha dalam penggunaan potensi daerah maka OPD Dinas Perindustrian melakukan beberapa program strategis antara lain :

- Memperbaiki iklim usaha untuk meningkatkan sentra industri prioritas dalam rangka mendukung peningkatan daya saing industri melalui pembinaan dan pembentukan sentra dan kawasan industri.
- Peningkatan Kapasitas Iptek sistem produksi sebagai salah satu program yang mendukung pemanfaatan Fasilitas teknologi yang mempunyai daya saing produk sehingga dapat dipromosikan dengan produk Industri yang inovatif dan kreasi melalui event daerah dan nasional.
- Pelaksanaan pembinaan industri kecil dan menengah sebagai fasilitas Industri tertuang dalam pengembangan kreasi usaha industri dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mampu mengikuti perkembangan dunia usaha industri yang kreatif.
- Memberikan pembinaan Penerapan pemakaian teknologi industri sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan mutu produknya menjadi lebih baik dan bermutu sehingga mampu bersaing baik secara domestik maupun luar domestik di berbagai daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Pada sisi Pelaku usaha OPD Dinas Perindustrian menyadari bahwa daya saing produk juga ditentukan oleh proses kemudahan dalam proses perizinan usaha yang terkait dengan pelaku usaha yang dapat mengembangkan mutu produk yang mempunyai nilai tinggi. Hal ini ditunjang dengan strategi peningkatan iklim usaha dan kelembagaan industri yang sehat dan berkeadilan melalui regulasi serta pelayanan publik yang prima.

PENGEMBANGAN DAERAH TERISOLIR

Dalam dunia industri semua aktifitas sektor logistik memegang peranan penting dalam menentukan daya saing sebuah produk, atau komoditas suatu daerah, artinya produk atau komoditas unggulan sekalipun tidak akan mampu bersaing di tengah persaingan pasar sebab besarnya biaya

logistik atau bahan baku industri akan sangat berpengaruh kepada kekompatan harga dari produk atau komoditas.

Semua itu adalah tantangan besar kepada pelaku usaha industri dalam mengembangkan usahanya. Untuk mendukung kreatifitas industri kabupaten kota baik yang terjangkau ataupun yang terisolir berdasarkan letak geografis daerah tersebut pemerintah dalam hal ini OPD Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi selatan melaksanakan bimbingan teknis dalam mengefisiensikan biaya bahan baku dengan pemampatan sumber daya alam yang ada sehingga menjadi muara dari semua aktivitas logistik pada kabupaten /kota.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memfasilitasi Pelaku Usaha pada daerah terisolir maka OPD Dinas Perindustrian melakukan beberapa program strategis antara lain :

- Mengoptimalkan pemanfaatan Kemajuan teknologi informasi untuk mendukung proses pemantauan perkembangan industri di setiap kabupaten /kota.
- Memberikan fasilitas bantuan alat kepada pelaku industri dalam menggunakan teknologi tepat guna
- Melaksanakan kerjasama kabupaten /kota dalam meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat terutama pada sektor industri.
- Melaksanakan pembinaan SDM pelaku industri dalam meningkatkan kreatifitas, inovasi, kreasi dalam pemanfaatan bahan baku.
- Melaksanakan pembinaan kepada pelaku Industri tentang pentingnya standarisasi produk sehingga dapat bersaing dalam pangsa pasar.
- Melaksanakan sentralisasi produk industri sehingga mempermudah komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan produksi industri yang berdaya saing dan nilai kreatif yang tinggi dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada daerah tersebut.

Sebagai acuan perlu kita ingat bahwa arah kebijakan pembangunan industri adalah penataan sistem distribusi antara daerah kabupaten kota yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa serta kepastian usaha dalam meningkatkan daya saing produk pada setiap daerah.

Selain pemberdayaan sektor industri pemberdayaan home industri juga perlu di berdayakan semaksimal mungkin mengingat pentingnya sektor IKM sebagai salah satu sektor yang perlu untuk di benahi seperti kemampuan manajemen, kualitas SDM yang masih terbatas, skala teknik industri dan teknologi yang relatif masih rendah, dalam hal ini upaya pemerintah dengan ini Dinas Perindustrian membuat program strategi dalam memfasilitasi IKM agar mampu bersaing dan mandiri

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat daerah

Program Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan . Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas , diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarka ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanannya. Pencapaian target kinerja program (Outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan namun juga oleh sumber sumber pendanaan lainnya seperti APBN, dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Adapun rencana Program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	8. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 10. Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD 11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	3. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 13. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
	4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	14. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD
	6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 18. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	21. Penyediaan jasa surat menyurat 22. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
	8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9. Kegiatan Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	27. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi 28. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan

		Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri 29. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 30. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 31. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 32. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
3. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	10. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Provinsi	33. Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem 34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi
4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	11. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	35. Fasilitas Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas 36. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas 37. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas

Program dan kegiatan pada Dinas Perrindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel TC 33 berikut :

Table 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3	31	3.31.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	Prov.Sulsel	0,03 %	25,046,549,255	APBD		0.03 %	25,047,449,255
						Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik		100%				100%	
						Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah		100%				100%	
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Prov.Sulsel	100%	529,200,000	APBD		100%	529,200,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (dokumen)	Prov.Sulsel	7 Dokumen	446,250,000	APBD		7 Dokumen	446,250,000
						jumlah peserta yang mengikuti forum OPD (orang)		100 orang				100 orang	

3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase penyusunan dokumen rka skpd tepat waktu (persen)	Prov.Sulsel	100%	10,500,000	APBD		100%	10,500,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase penyusunan dokumen rka perubahan skpd tepat waktu (persen)	Prov.Sulsel	100%	12,600,000	APBD		100%	12.600.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	persentase penyusunan dokumen dpa skpd tepat waktu (persen)	Prov.Sulsel	100%	10,500,000	APBD		100%	10,500,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	persentase penyusunan dokumen dpa perubahan skpd tepat waktu (persen)	Prov.Sulsel	100%	12.600.000	APBD		100%	12.600.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi skpd (laporan)	Prov.Sulsel	12 Laporan	10,500,000	APBD		12 Laporan	10,500,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.01	3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	Prov.Sulsel	4 Dokumen	26.250.000	APBD		4 Dokumen	26.250.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Prov.Sulsel	100%	14.343.000.000	APBD		100%	14.343.000.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02	3.31.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	Prov.Sulsel	77 Orang / bulan	13,650,000,000	APBD		77 Orang / bulan	13,650,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02	3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah sub kegiatan pelaksanaan penatusahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan skpd (sub kegiatan)	Prov.Sulsel	31 sub kegiatan	315,000,000	APBD		31 sub kegiatan	315,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.02	3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	jumlah laporan keuangan skpd (laporan)	Prov.Sulsel	19 Laporan	367.500.000	APBD		19 Laporan	367.500.000

3	31	3.31.01	3.31.01.1.02	3.31.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah laporan hasil pemeriksaan (laporan)	Prov.Sulsel	2 Laporan	105,000,000	APBD		2 Laporan	105,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.04		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah (Rp)	Prov.Sulsel	220500000 Rupiah	10,000,000	APBD		220500000 Rupiah	10,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.04	3.31.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah (dokumen)	Prov.Sulsel	1 Dokumen	105,000,000	APBD		1 Dokumen	105,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.04	3.31.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	jumlah dokumen analisa pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi (dokumen)	Prov.Sulsel	2 Dokumen	105,000,000	APBD		2 Dokumen	105,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Prov.Sulsel	100%	105,000,000	APBD		100%	105,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.05	3.31.01.0.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah laporan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan (laporan)	Prov.Sulsel	1 Laporan	105,000,000	APBD		1 Laporan	105,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Prov.Sulsel	100%	867,499,255	APBD		100%	867,499,255
3	31	3.31.01	3.31.01.1.06	3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (unit)	Prov.Sulsel	520 unit	27,499,255	APBD		520 unit	27,499,255
3	31	3.31.01	3.31.01.1.06	3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi skpd (kali)	Prov.Sulsel	165 kali	840.000.000	APBD		165 kali	840.000.000

3	31	3.31.01	3.31.01.1.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prov.Sulsel	100%	4,550,000,000	APBD		100%	4,550,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.07	3.31.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	Prov.Sulsel	1 Unit%	1,100,000,000			1 Unit%	1.100.000.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.07	3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan (unit)	Prov.Sulsel	1 Unit%	300.000.000			1 Unit%	300.000.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.07	3.31.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang diadakan (item)	Prov.Sulsel	4 Item	1.050.000.000	APBD		4 Item	1.050.000.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.07	3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi skpd (kali)	Prov.Sulsel	2 Item	2.100.000.000	APBD		2 Item	2.100.000.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov.Sulsel	100%	3,381,000,000	APBD		100%	3,381,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.08	3.31.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang keluar dan masuk (surat)	Prov.Sulsel	700 surat	126,000,000	APBD		800 surat	126,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.08	3.31.01.1.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	jumlah dokumen pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (dokumen)	Prov.Sulsel	24 dokumen	630.000.000	APBD		24 dokumen	630.000.000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.08	3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	jumlah orang jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya (orang)	Prov.Sulsel	49 orang/ bulan	2.625.000.000	APBD		49 orang/ bulan	2.625.000.000

3	31	3.31.01	3.31.01.1.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Prov.Sulsel	100%	1,061,750,000	APBD		100%	1,061,750,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.09	3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	Prov.Sulsel	4 unit	525,000,000	APBD		4 unit	525,000,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.09	3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	Prov.Sulsel	14 unit	36,750,000	APBD		14 unit	36,750,000
3	31	3.31.01	3.31.01.1.09	3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara (item)	Prov.Sulsel	6 item	500,000,000	APBD		6 item	500,000,000
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri	Prov.Sulsel	7%	11,070,000,000	APBD		7%	11,070,000,000
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01		Kegiatan Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	persentase peningkatan industri yang dibina dan dikembangkan	Prov.Sulsel	5%	11,070,000,000	APBD		5%	11,070,000,000
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah dokumen penyusunan rencana pembangunan industri yang disusun (Dokumen)	Prov.Sulsel	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000

3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.02	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan (dokumen)	Prov.Sulsel	1 Dokumen	350,000,000	APBD		1 Dokumen	350,000,000
						jumlah dokumen kebijakan industri hijau dan SNI industri yang dilaksanakan (dokumen)	Prov.Sulsel	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.03	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah sumber daya manusia industri yang dibina (orang)	Prov.Sulsel	400 Orang	4,800,000,000	APBD		400 Orang	4,800,000,000
						Jumlah potensi sumberdaya unggulan daerah yang dikembangkan menjadi potensi sumberdaya industri (potensi)	Prov.Sulsel	1 Potensi		APBD		1 Potensi	
						Jumlah inovasi teknologi dan peralatan industri yang dikembangkan (unit)	Prov.Sulsel	15 Unit		APBD		15 Unit	
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah sarana dan prasarana sentra industri yang dibina dan dikembangkan (sentra)	Prov.Sulsel	10 Sentra	1,500,000,000	APBD		10 Sentra	1,500,000,000
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait makanan, minuman dan kemasan (pelayanan)	Prov.Sulsel	30 Pelayanan	4,100,000,000	APBD		30 Pelayanan	4,100,000,000
						Jumlah pelayanan administrasi UPT Logam, tekstil dan alat mesin pertanian (pelayanan)	Prov.Sulsel	100 Pelayanan		APBD		100 Pelayanan	
						Jumlah pelayanan dan	Prov.Sulsel	20 Pelayanan		APBD		0 Pelayanan	

						pendampingan masyarakat industri terkait tekstil (pelayanan)							
						Jumlah pelayanan dan pendampingan masyarakat industri terkait logam (pelayanan)	Prov.Sulsel	50 Pelayanan		APBD		50 Pelayanan	
3	31	3.31.02	3.31.02.1.01	3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri (dokumen)	Prov.Sulsel	6 Dokumen	120,000,000	APBD		6 Dokumen	120,000,000
3	31	3.31.03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	% Peningkatan pengendalian izin usaha industri	Prov.Sulsel	2%	350,000,000	APBD		2%	350,000,000
3	31	3.31.03	3.31.03.1.01		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Provinsi	persentase industri yang bersertifikat/ terstandarisasi	Prov.Sulsel	12%	350,000,000	APBD		12%	350,000,000
	31	3.31.03	3.31.03.1.01	3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem	jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan standarisasi industri (Sertifikat)	Prov.Sulsel	200 Sertifikat	175,000,000	APBD		200 Sertifikat	175,000,000
3	31	3.31.03	3.31.03.1.01	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen pengawasan perizinan industri (IUI, IPUI, IUKI dan IPKI) kewenangan provinsi (Dokumen)	Prov.Sulsel	9 Dokumen	175,000,000	APBD		9 Dokumen	175,000,000

3	31	3.31.04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	% Peningkatan pengelolaan SIINAS	Prov.Sulsel	4%	577,500,000	APBD		4%	577,500,000
3	31	3.31.04	3.31.04.1.01		Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berkas Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	persentase peningkatan penyediaan informasi industri berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS)	Prov.Sulsel	4%	577,500,000	APBD		4%	577,500,000
3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	Jumlah dokumen/ informasi industri hasil pengolahan dan analisis melalui SIINAS (Dokumen)	Prov.Sulsel	4 Dokumen	262,500,000	APBD		4 Dokumen	262,500,000
3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	jumlah diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui siinas (Publikasi data/informasi)	Prov.Sulsel	4 Publikasi data/informas i	157,500,000	APBD		4 Publikasi data/informasi	157,500,000
3	31	3.31.04	3.31.04.1.01	3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan industri dan kawasan industri dalam penyampaian data ke SIINAS (Dokumen)	Prov.Sulsel	4 Dokumen	157,500,000	APBD		4 Dokumen	157,500,000
									37,044,949,255				37,044,949,255

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Tahun 2021 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat daerah Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun dengan Instansi terkait lainnya. Untuk itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna untuk menunjang keberhasilan program/kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun-tahun berikutnya.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas

Program prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2022

1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 telah disusun sebagai pedoman utama penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk RKT Tahun 2022 karena pelaksanaan pembangunan sektor Perindustrian di Sulawesi Selatan merupakan suatu kesatuan rangkaian kegiatan selama periode tersebut dalam upaya pencapaian Visi **Sulawesi selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter**".

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi didalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemahkan provinsi Sulawesi Selatan yang "bersih dan melayani" terkoneksi", mandiri dan sejahtera", sehat dan cerdas serta berkarakter". Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- **INOVATIF** adalah kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk Baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang bersih melayani.
- **KOMPETITIF** adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang sehat dan cerdas.

- **PRODUKTIF** adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujudnya Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera.
- **INKLUSIF** Adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi .
- **BERKARAKTER** Adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang berkarakter.

Dalam pelaksanaannya nilai-nilai agama dan budaya daerah dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah semestinya menjadi kaidah pelaksanaan, seperti; **Good Governance** (tata kelola pemerintahan), **Integrity (integritas)**, **Quality and Accountability** (mutu dan akuntabilitas), **pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, dan penggunaan data dan informasi yang terintegrasi, akurat, terbaharukan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam upaya pencapaian visi, misi, dan sasaran program/kegiatan strategi dasar yang ditempuh adalah : "Meningkatkan fasilitasi dan pelayanan yang efisien, efektif dan akuntabel di sektor industri dan sektor perdagangan guna mewujudkan sektor industri sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah melalui pengembangan kompetensi inti daerah".

Di sisi lain, Sumberdaya Manusia yang ada pada Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan masih membutuhkan peningkatan baik dari sisi kompetensi substantif maupun kuantitasnya guna mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan perindustri di Sulawesi Selatan. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari berbagai pihak pemangku kepentingan termasuk peningkatan koordinasi dan kolaborasi.

2. Saran

1. Adanya peningkatan koordinasi antara Bidang dalam lingkup Dinas Perindustrian maupun Dinas di Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan
2. Tersedianya informasi teknologi maupun pasar di tingkat Provinsi dan Kabupaten
3. Menciptakan iklim usaha dengan Koordinasi yang baik dari semua instansi dan lembaga pemerintah maupun pengusaha
4. Menghilangkan biaya/pungutan yang membebani pengusaha industri
5. Lembaga keuangan dapat membuka paket kredit di sektor industri baik hulu maupun hilir.
6. Adanya kebijakan
7. untuk perwilayah komoditi dari suatu daerah.

Untuk meningkatkan SDM aparatur diperlukan pembinaan melalui diklat dan studi banding.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Makassar, 3 Maret 2021
Kepala Dinas Perindustrian
Provinsi Sulawesi Selatan,

H. AHMADI AKIL, SE, MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 0

